



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2020

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016–2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang baik, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja mengandung tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 2 Juni 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara

The image shows a circular official stamp of the Kutai Kartanegara District Office (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). The stamp is purple and contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA' around the perimeter and 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

NIP.19681210 198803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan RKPD	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan dan Sasaran RKPD	23
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
4.1. Program dan Kegiatan	24
BAB V. PENUTUP	28
LAMPIRAN MATRIK PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN PD.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada tahun 2021.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah kabupaten, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 mengikuti tata cara dan

alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- q. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan, untuk lebih jelasnya dapat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1											
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja											
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)											
Kabupaten Kutai Kartanegara											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (RENSTRAPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (RENJAPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian RENSTRAPD s/d Tahun Berjalan (2020)	
						Target RENJAPD Tahun 2019	Realisasi RENJAPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRAPD (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10=5+7	11=(10/4)
2.06 01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
2.06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100%				100%			70%
2.06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Lembar Materai	1,600	400	400	400	100%	400	1,200	75%
2.06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	1,978	622	336	336	100%	504	1,462	74%
2.06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit kendaraan	75	25	10	10	100%	20	55	73%
2.06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	orang	1,014	248	300	300	100%	0	548	54%
2.06 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	unit	45	0	5	5	100%	5	10	22%
2.06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	81	30	15	15	100%	18	63	78%
2.06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	30	12	7	7	100%	7	26	87%
2.06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	eksemplar	43,200	10,800	10800	10800	100%	10800	32,400	75%
2.06 01 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	jenis	30	0	10	10	100%	10	20	67%
2.06 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman	Kotak	6,446	1,228	1218	1218	100%	2000	4,446	69%

2.06	01	01	19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	orang	397	162	88	88	100%	81	331	83%
2.06	01	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	orang	2,400	936	468	468	100%	456	1,860	78%
2.06	01	01	21	Penyediaan Jasa Perumahan	Jumlah jasa perumahan	UPTD	10	4	2	2	100%	2	8	80%
2.06	01	01	22	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip	Dokumen	150,000	0	0	0	0%	75000	75,000	0%
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur		100%				100%			88%
2.06	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	unit kendaraan dinas	5	0	0	0	0%	4	4	80%
2.06	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	190	60	75	75	100%	52	187	98%
2.06	01	02	10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Unit	134	10	4	4	100%	60	74	55%
2.06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit kendaraan	55	25	11	11	100%	10	46	84%
2.06	01	02	24	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	3	0	1	1	100%	0	1	33%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur		100%				0%			33%
2.06	01	05	04	Fasilitasi Bekias	Jumlah Inovasi	Inovasi	3	0	1	0	0%	1	1	33%
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tingkat Capaian Kinerja		100%				33%			58%
2.06	01	06	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen	Dokumen	32	8	8	8	100%	8	24	75%
2.06	01	06	05	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	50%
2.06	01	06	05	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	50%
				Program Penataan Administrasi Kependudukan			100%				112%			100%
					Cakupan KTP Elektronik									
2.06	01	5	20	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	Jumlah layanan KTP	KTP elektronik	175,000	35,000	40,000	40,000	100%	50,000	125,000	71%
				Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	KIA	158,525	35,000	10,000	12,066	121%	40,000	87,066	55%
				Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	Jumlah dokumen data	Dokumen	1	0	1	1	100%	1	2	200%
2.06	01	5	28	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penertiban	Lokasi	2	0	0	0	0%	1	1	50%
					Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah									
2.06	01	5	24	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	Jumlah Akta	Kutipan Akta Perkawinan	1500	10	400	422	106%	450	882	59%
					Persentase Penerbitan Akta Kematian									

206	01	5	24	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	Jumlah Akta	Kutipan Akta Kematian	1500	66	450	459	102%	450	975	65%
					Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran									
206	01	5	27	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah Akta	Kutipan Akta Kelahiran	10000	1000	3000	2665	89%	4000	7,665	77%
206	01	5	25	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta	Peserta	122	0	36	0	0%	72	72	59%
206	01	5	26	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	20,000	20,000	0	0	0%	0	20,000	100%
206	01	5	22	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	673	1000	675	68%	1000	2,348	59%
206	01	5	33	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	1,299	1000	2242	224%	1000	4,541	114%
206	01	5	34	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	1,200	1000	1134	113%	1000	3,334	83%
206	01	5	35	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	1,000	1000	2152	215%	1000	4,152	104%
				Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis		100%				93%			86%
				Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah RT yang menerima Laptop dan menguasai aplikasi teknis kependudukan	RT	3,058	647	1,177	1,177	100%	1,234	3,058	100%
					Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan		100%				86%			72%
206	01	5	21	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah jaringan yang dipelihara	Jaringan	76	19	19	19	100%	19	57	75%
206	01	5	08	Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah data base	Database	3	0	1	1	100%	1	2	67%
206	01	5	29	Penyajian Informasi Kependudukan	Jumlah Informasi	Jenis Informasi	18	6	4	4	100%	4	14	78%
206	01	5	5	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah dokumen	Dokumen	4	1	1	1	100%	1	3	75%
206	01	5	8	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Jumlah dokumen	Dokumen	4	1	1	1	100%	1	3	75%
206	01	5	30	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah dokumen	Dokumen	3	1	0	0	0%	1	2	67%
206	01	5	32	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta	Peserta	600	0	200	200	100%	200	400	67%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan yang *belum* memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian 0% dari target sebesar 100%.
 - Kegiatan Fasilitasi Bekias dengan target sebanyak 1 inovasi, capaian kegiatan ini sebesar 0%.
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan capaian 29% dari target sebesar 100%.
3. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dengan capaian 11% dari target sebesar 100%.
 - Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan dengan target sebanyak 1 database, capaian kegiatan ini sebesar 0%.
 - Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dengan target sebanyak 1 dokumen, capaian kegiatan ini sebesar 0%.
 - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri dengan target sebanyak 1 dokumen, capaian kegiatan ini sebesar 0%.

b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja kegiatan sudah mencapai 68%
2. Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja kegiatan sudah mencapai 57%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan capaian kinerja kegiatan sudah mencapai 100%.

c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran untuk tahun 2019 tidak ada, mengingat kegiatan yang diselenggarakan baru berjalan dua triwulan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,

Tidak tercapainya target pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Program Keserasian Kebijakan Kependudukan, dikarenakan anggaran kas kegiatan tersebut berada pada triwulan III dan IV, hal ini menyesuaikan porsi kegiatan 20% pada triwulan I dan 20 % pada triwulan II, dan 30% pada triwulan III dan 30% pada triwulan IV, sesuai dengan arahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat program dan kegiatan baru berjalan dua triwulan, hal tersebut belum akan mempengaruhi capaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, kemungkinan peluang untuk mencapai target kinerja masih sangat besar, karena saat ini program dan kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaan sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan proyeksi untuk Tahun 2021 dan 2022 kami sajikan dalam bentuk tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2																
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021																
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(15)	(15)	(16)
1	Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk	100	100	91%	94%	96%	98%	99%	99%	90%	94%	98%	97,97%	99%	99%	
2	Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah		88	73%	78%	83%	88%	88%	90%	21,28%	24.10%	37.02%	40.78%	88%	90%	
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian		100	25%	50%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100	100	93%	95%	97%	98%	99%	99%	91%	95%	97%	96.14%	99%	99%	
5	Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	2 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Hari	1 Hari	1 Hari	2 Jam	1 Jam	1 Jam	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100	78%	78%	88%	88%	89%	89%	78%	88%	70%	79.70%	89%	89%	
7	Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai aplikasi		3.058 RT	547 RT	100 RT	1.177 RT	1289 RT	55 RT	0 RT	280 RT (17,88%)	100 RT (21,15%)	1177 RT (59,64%)	1234 RT (98,23%)	55 RT (100%)	100%	
8	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan		100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Untuk pencapaian indikator Rasio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga, pada awal renstra telah mencapai 100 %, sehingga untuk indikator tersebut tidak dijadikan indikator kinerja pelayanan lagi, sedangkan untuk 6 (delapan) Indikator Kinerja lainnya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan KTP elektronik, cakupan KTP Elektronik persatuan penduduk, pada tahun awal Renstra telah mencapai mencapai 86,18%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 89,77% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 416.440 orang, sedangkan untuk realisasi tahun 2018 adalah sebesar 95,95% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 457.025 orang atau lebih 2,95% dari yang telah ditargetkan sebesar 93%, atau lebih 6,18% dari capaian tahun sebelumnya, sedangkan untuk capaian tahun 2019 adalah sebesar 98,65% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 476.728 orang atau lebih 2,70%, hal ini dikarenakan ketersediaan blanko KTP-el yang tidak pernah kosong dengan didukung tambahan peralatan cetak KTP-el menjadi 11 unit dan tim perekaman keliling yang dilaksanakan oleh operator kecamatan bekerjasama dengan operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pemenuhan kebutuhan KTP-el dapat berjalan sesuai target, untuk diketahui Tahun 2017 ketersediaan blanko dan pencetakan KTP-el adalah sebanyak 33.419 keping KTP-el, untuk Tahun 2018 ketersediaan blanko dan pencetakan KTP-el adalah sebanyak 74.000 keping KTP-el, sedangkan untuk tahun 2019 dilakukan kerjasama pencetakan KTP-el dengan pihak ketiga lebih kurang sebanyak 40.000 keping KTP-el, sehingga mengalami peningkatan pencetakan dan distribusi blanko KTP-el dari tahun sebelumnya dengan persentase kenaikan sebesar 221,43 %, untuk jumlah wajib KTP tahun 2017 adalah sebanyak 463.909 wajib KTP, tahun 2018 jumlah wajib KTP meningkat menjadi 476.331, untuk tahun 2019 meningkat menjadi 483.268 wajib KTP-el, atau meningkat sebanyak 1,45%, hal ini dikarenakan adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,80%, anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator ini menggunakan anggaran APBD Tahun 2019 melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Operasional Pelayanan KTP elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan APBN Tahun 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Kementerian Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.879.045.000,00.

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya terus menerus dilakukan percepatan kepemilikan KTP-el dengan cara melihat data lokasi-lokasi di kecamatan mana saja yang capaiannya masih rendah untuk dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) perekaman dan memprioritaskan pencetakan

KTP-el pada lokasi tersebut, untuk percepatan pencetakan KTP-el sebaiknya menambah alat cetak/printer KTP-el baru agar dapat mempercepat proses pencetakan KTP-el.

2. Rasio Pasangan Non Muslim ber Akta Nikah, untuk tahun 2018 adalah sebanyak 4.251 Akta Perkawinan yang telah diterbitkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang penerbitan Kutipan Akta Perkawinannya mencapai 3.815 dokumen, apabila dipersentasekan mengalami peningkatan capaian sebesar 11,43%, untuk tahun 2019 penerbitan kutipan Akta perkawinan sebesar 593 dokumen, sampai akhir tahun 2019 penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan adalah sebanyak 8.659 dokumen Kutipan Akta Perkawinan, apabila dibandingkan dengan data Kartu Keluarga Non Muslim yang sebanyak 16.089 KK, maka dapat dipersentasekan capaian kinerja sampai akhir tahun 2019 adalah sebesar 53% sedangkan target yang akan dicapai sampai tahun 2019 adalah sebesar 83%, dari capaian kinerja tersebut masih belum mencapai dari target yang direncanakan atau masih kurang 30%, untuk itu dimasa yang akan datang sebaiknya dilakukan kegiatan pelayanan langsung penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di beberapa kecamatan secara massif, sambil memberikan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki Akta perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan yang diakui oleh negara sesuai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan non muslim.

3. Persentase Penerbitan Akta Kematian, sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebanyak 22.122 dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan, dibandingkan sampai akhir tahun 2018 adalah sebanyak 21.326 dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan, maka dapat dipersentasekan mengalami peningkatan sebesar 3,73%, atau meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 796 dokumen kutipan Akta Kematian, sedangkan sampai akhir tahun 2017 telah diterbitkan dokumen kutipan Akta Kematian sebanyak 19.090, untuk persentase penerbitan keseluruhan kami menganggap telah mencapai 100% dalam penerbitan Akta kematian, karena tidak ada data pembandingnya dalam setiap tahunnya, hal ini dikarenakan tidak adanya data laporan kematian penduduk secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) secara terus menerus berdasarkan data dimana banyak terdapat penduduk yang telah meninggal dunia, adapun untuk mengetahui data kematian penduduk sebaiknya berkoordinasi dengan OPD

terkait seperti : Dinas Kesehatan, kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan

- 4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran,** pada awal tahun Renstra telah mencapai 65%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 69%, untuk realisasi tahun 2018 adalah sebesar 97%, sedangkan untuk tahun 2019 realisasi capaian kinerja penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah sebesar 97% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 97%, maka tidak terjadi peningkatan atau sama capaiannya, untuk diketahui data yang diakui adalah data yang ada didalam database dimana setiap orang/penduduk yang memiliki nomor registrasi atau nomor Kutipan Akta Kelahiran harus tercatat didalam database tersebut, apabila orang/penduduk tersebut memiliki Kutipan Akta Kelahiran tetapi tidak tercatat kedalam database maka hal ini tidak dianggap memiliki Kutipan Akta Kelahiran sampai nomor registrasi tersebut dicatat kedalam database barulah Kutipan Akta Kelahiran tersebut diakui secara jumlah kepemilikan, dengan demikian jika dilihat dari segi jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan maka terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang telah mencapai 154.643 dokumen (DKB II tahun 2017), sedangkan tahun 2018 sebesar 207.149 dokumen Kutipan Akta Kelahiran (DKB II tahun 2018), untuk tahun 2019 penerbitan kutipan Akta Kelahiran telah mencapai 213.123, apabila dipersentasekan meningkat sebesar 2,88%, atau lebih 5.974 dokumen Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini tiap tahunnya mengalami peningkatan capaian kinerja, sehingga untuk ditahun-tahun selanjutnya agar dipertahankan kinerjanya tanpa harus menghilangkan kegiatan pelayanan langsung (jemput bola), selain dari itu terus melakukan inovasi pelayanan.

- 5. Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan,** pada awal tahun Renstra telah mencapai 8,7% atau sebanyak 267 RT, untuk capaian tahun 2017 telah terealisasi sebanyak 280 RT, sedangkan untuk tahun 2018 terealisasi sebanyak 100 RT, sedangkan untuk tahun 2019 terealisasi sebanyak 1.177 RT atau apabila dijumlahkan telah mencapai 1.824 RT dengan persentase sebesar 59%, untuk rencana ditahun 2020 kami menargetkan 1.234 RT atau mencapai 100%, sehingga satu tahun sebelum akhir tahun Renstra sudah terealisasi seluruhnya sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu sebanyak 3.058 RT, untuk dimasa yang akan datang sebaiknya dilakukan

mutasi aset yang berupa laptop dan printer yang sudah didistribusikan kepada ketua RT di masing-masing kecamatan dan desa, sehingga memudahkan perangkat daerah yang ada di desa atau kecamatan untuk menginventarisir, mengawasi dan menjaga kondisi aset tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

6. Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan, merupakan indikator kinerja yang telah dilaksanakan setiap tahun, untuk capaian tahun 2018 telah terealisasi 100%, dengan jumlah kegiatan pada APBD Tahun 2018 sebanyak 6 kegiatan, sedangkan untuk tahun 2019 telah terealisasi 100% dengan jumlah kegiatan sama dengan tahun sebelumnya, kegiatan ini juga didukung dari Dana Alokasi Khusus, sehingga layanan informasi dapat terealisasi 100%, sedangkan untuk tahun 2019 telah dianggarkan sesuai dengan target yang ditetapkan, untuk proyeksi tahun 2020 tetap ditargetkan sesuai indikator kinerja yang dilakukan perubahan agar capaian kinerja kegiatan dapat terukur dengan baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 belum dapat di evaluasi secara maksimal, mengingat kegiatan Tahun Anggaran 2020 baru berjalan satu triwulan, akan tetapi untuk capaian per 31 Desember 2019 dapat dilihat dengan rata-rata capaian diatas 94,50 %, hal ini dikarenakan dari 6 (enam) indikator kinerja pelayanan rata-rata capaian kinerjanya sudah mencapai 94%, hanya satu indikator baru mencapai 78%, untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah kurangnya persediaan blangko KTP-el yang tersedia, mengingat ketersediaan blangko tersebut berdasarkan hibah dari

Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu "Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil "

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD **Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :**

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Belum tersedianya gedung arsip mandiri yang representative, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses program KTP Elektronik yang ditanda tangani Bupati dan Ketua DPRD.
2. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan secara modern sesuai dengan standar internasional yang

telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan pelaksanaanya;

2. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan segera dibangun gedung arsip mandiri yang representative dan terjaga keamanannya;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan				9,822,459,137		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan				10,423,700,000		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				9,822,459,137		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				10,423,700,000		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	2,767,946,937	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	2,883,560,100		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Jasa Surat Menyurat	400 lembar Material	2,300,000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Jasa Surat Menyurat	2.400 lembar Perangko dan Material	44,900,000	Penambahan jumlah target capaian yang awalnya pengadaan 400 material bertambah 2.000 bea perangko surat kilat khusus, sehingga perlu menambah pagu belanja	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504 Rekening	78,720,000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504 Rekening	78,720,000		
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	20 unit kendaraan	40,000,000	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	20 unit kendaraan	40,000,000		
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	20 unit	62,500,000	4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	20 unit	62,500,000		
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong	Jumlah Alat Tulis Kantor	33 jenis	458,313,100	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong	Jumlah Alat Tulis Kantor	40 jenis	458,313,100		
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	407,538,100	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	407,538,100		
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan	10.800 eksemplar	45,000,000	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan	10.800 eksemplar	45,000,000		
	8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 jenis	20,000,000	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 jenis	20,000,000		
	9 Penyediaan Makan dan Minum	Tenggarong	Jumlah Makanan dan Minuman	2.000 Kotak	47,500,000	9	Penyediaan Makanan dan Minum	Tenggarong	Jumlah Makanan dan Minuman	2.000 Kotak	47,500,000		
	10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Tenggarong	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	81orang	536,214,000	10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Tenggarong	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	97 orang	609,027,200	Penambahan jumlah orang/kali agar dapat mendukung pelayanan langsung jemput bola pada Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal	
	11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	456 O/B (38 orang)	750,061,737	11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	456 O/B	750,061,700		
	12 Penyediaan Jasa Perumahan	Tenggarong	Jumlah jasa perumahan	2 UPTD	70,000,000	12	Penyediaan Jasa Perumahan	Tenggarong	Jumlah jasa perumahan	2 UPTD	70,000,000		
	13 Penataan Arsip Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Arsip	75.000 Berkas	250,000,000	13	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Arsip	75.000 Berkas	250,000,000		

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	1,552,750,000	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	1,552,750,000	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong	Jumlah pengadaan kendaraan	1unit kendaraan roda 4	600,000,000	14	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong	Jumlah pengadaan kendaraan	1unit kendaraan roda 4	600,000,000	
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	52 unit	800,000,000	15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	52 unit	800,000,000	
16	Pengadaan Meubeler	Tenggarong	Jumlah Pengadaan Mebeleur	60 buah	97,750,000	16	Pengadaan Meubeler	Tenggarong	Jumlah Pengadaan Mebeleur	13 unit	97,750,000	Pengurangan rincian volume target yang awalnya pengadaan 10 unit kursi tunggu besar dan 50 unit kursi tunggu kecil menjadi 13 unit kursi tunggu besar
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	10 unit kendaraan	55,000,000	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	10 unit kendaraan	55,000,000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100,000,000	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	100,000,000	
18	Facilitasi Tim BEKIAS	Tenggarong	Jumlah Orang	1inovasi	100,000,000	18	Facilitasi Tim BEKIAS	Tenggarong	Jumlah Orang	1inovasi	100,000,000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat Capaian Kinerja	100%	455,219,200	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat Capaian Kinerja	100%	556,940,200	
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Tenggarong	Jumlah dokumen	8 Dokumen	158,579,000	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Tenggarong	Jumlah dokumen	8 Dokumen	158,579,000	
20	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1dokumen	246,640,200	20	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1dokumen	348,361,200	Penambahan jumlah belanja karena adanya tambahan 4 (empat) Kuasa Pengguna Anggaran, 1(satu) PPTK dan 3 (tiga) Staf PP TK
21	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1dokumen	50,000,000	21	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1dokumen	50,000,000	
V	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Cakupan KTP Elektronik	100%	4,159,721,100	V	Program Penataan Administrasi Kependudukan			100%	4,419,721,100	
22	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	18 Kecamatan	Jumlah layanan KTP	50.000 KTPel	225,000,000	22	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	18 Kecamatan	Jumlah layanan KTP	50.000 KTPel	225,000,000	
23	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	18 Kecamatan	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	74.000 KIA	400,868,000	23	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	18 Kecamatan	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	74.000 KIA	400,868,000	
24	Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	18 Kecamatan	Jumlah dokumen	-	-	24	Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	18 Kecamatan	Jumlah dokumen	-	-	
25	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Lokasi	1Lokasi	100,000,000	24	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Lokasi	1Lokasi	100,000,000	
26	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	3 Kecamatan	Jumlah akta	450 Kutipan Akta Perkawinan	150,000,000	25	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	3 Kecamatan	Jumlah akta	500 Kutipan Akta Perkawinan	200,000,000	Penambahan jumlah target capaian untuk membantu meningkatkan keikutsertaan BPJS pada Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan syarat kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sehingga perlu menambah pagu belanja
27	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	3 Kecamatan	Jumlah akta	450 Kutipan Akta Kematian	150,000,000	26	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	3 Kecamatan	Jumlah akta	500 Kutipan Akta Kematian	200,000,000	Penambahan jumlah target capaian untuk membantu meningkatkan keikutsertaan BPJS pada Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan syarat kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sehingga perlu menambah pagu belanja
28	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	4 Kecamatan	Jumlah akta	3.000 Kutipan Akta Kelahiran	244,063,100	27	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	4 Kecamatan	Jumlah akta	3.000 Kutipan Akta Kelahiran	244,063,100	

29	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenggarong	Jumlah peserta	72 Peserta	175,000,000	28	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tenggarong	Jumlah peserta	72 Peserta	175,000,000	
30	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah akta	Dokumen	-		Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah akta	Dokumen	-	
31	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang Janggut	Kembang Janggut, Tabang dan Keno han	Jumlah akta	1000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	29	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang Janggut	Kembang Janggut, Tabang dan Keno han	Jumlah akta	1500 Kutipan Akta Kelahiran	125,000,000	Penambahan jumlah target capaian untuk membantu meningkatkan keikutsertaan BPJS pada Desa Tertinggal dengan syarat kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sehingga perlu menambah pagu belanja
32	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota Bangun	Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis	Jumlah akta	1000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	30	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota Bangun	Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis	Jumlah akta	1500 Kutipan Akta Kelahiran	125,000,000	Penambahan jumlah target capaian untuk membantu meningkatkan keikutsertaan BPJS pada Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan syarat kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sehingga perlu menambah pagu belanja
33	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Jawa	Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana	Jumlah akta	1000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	31	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Jawa	Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana	Jumlah akta	1500 Kutipan Akta Kelahiran	125,000,000	Penambahan jumlah target capaian untuk membantu meningkatkan keikutsertaan BPJS pada Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan syarat kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sehingga perlu menambah pagu belanja
34	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak	Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga	Jumlah akta	1000 Kutipan Akta Kelahiran	85,000,000	32	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak	Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga	Jumlah akta	1500 Kutipan Akta Kelahiran	125,000,000	Penambahan jumlah target capaian untuk membantu meningkatkan keikutsertaan BPJS pada Desa Tertinggal dengan syarat kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sehingga perlu menambah pagu belanja
35	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan	1Dokumen Laporan	2,374,790,000	33	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan	1Dokumen Laporan	2,374,790,000	
VI	Program Kesenjangan Kebijakan Kependudukan		Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	786,821,900	VI	Program Kesenjangan Kebijakan Kependudukan		Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	910,728,600	
36	Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	18 Kecamatan	Jumlah RT yang menerima Laptop		-		Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara				-	Kegiatan sudah terealisasi seluruhnya pada Tahun Anggaran 2020
37	Pemeliharaan Jaringan dan Pengerahan SIAK secara terpadu	18 Kecamatan	Jumlah jaringan yang dipelihara	19 Jaringan	125,000,000	34	Pemeliharaan Jaringan dan Pengerahan SIAK secara terpadu	18 Kecamatan	Jumlah jaringan yang dipelihara	19 Jaringan	125,000,000	
38	Pengembangan Data Base Kependudukan	18 Kecamatan	Jumlah data base	1Database	125,000,000	35	Pengembangan Data Base Kependudukan	18 Kecamatan	Jumlah data base	1Database	125,000,000	
39	Penyajian Informasi Kependudukan	18 Kecamatan	Jumlah dokumen	4 Jenis Informasi	125,000,000	36	Penyajian Informasi Kependudukan	18 Kecamatan	Jumlah dokumen	4 Jenis Informasi	125,000,000	
40	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tenggarong	Jumlah dokumen	1Buku Profil Perkembangan Penduduk	75,000,000	37	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tenggarong	Jumlah dokumen	1Buku Profil Perkembangan Penduduk	75,000,000	
41	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Tenggarong	Jumlah dokumen	1Dokumen	85,000,000	38	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Tenggarong	Jumlah dokumen	1Dokumen	85,000,000	
42	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Tenggarong	Jumlah dokumen	1Dokumen	126,821,900	39	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Tenggarong	Jumlah dokumen	1Dokumen	126,821,900	
43	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Tenggarong	Jumlah peserta	200 Peserta	125,000,000	40	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Tenggarong	Jumlah peserta	630 Peserta	248,906,700	Penambahan jumlah target capaian yang awalnya 200 peserta (4 Kecamatan) menjadi 630 peserta (18 Kecamatan terutama pada desa yang berstatus sangat tertinggal dan desa tertinggal), sehingga perlu menambah pagu belanja

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. "Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) dan antar Pemerintah Daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja PD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan, adapun data-data usulan program dan kegiatan masyarakat terdiri dari :

- Data usulan dari kecamatan yg difasilitasi dgn kegiatan Musrenbang Kecamatan.
- Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD.
- Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu hasil dari Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Renja akhir SKPD merupakan hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, apabila ada usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Untuk Tahun 2021 maka akan kami tampilkan pada Tabel 2.5 dibawah ini, dan jika tidak ada usulan, maka hanya tabel kosong yang kami tampilkan. (Lihat Table 2.5)

Tabel 2.5					
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020					
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Kabupaten Kutai Kartanegara					
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada hakekatnya adalah upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :
 - a. Aspek Landasan Hukum.
 - b. Aspek Kelembagaan dan SDM
 - c. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan
 - d. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat
 - e. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan
2. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :
 - a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
 - b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan; dan rekaman retina mata
 - c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;

- d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana
- e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
- f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, adapun tujuannya adalah **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2021 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Sesuai Tujuan Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 berisi Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 direncanakan berjumlah 6 Program dengan 40 Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD dan 1 Kegiatan dibiayai melalui Anggaran APBN, yang sebagian besar merupakan Program Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar Rp.10.423.700.000,00 dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBD sebesar Rp.8.048.910.000,00 dan APBN sebesar Rp.2.374.790.000,00, untuk rencana prakiraan maju tahun 2022 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp.10.423.700.000,- dengan jumlah Program sebanyak 6 Program dan 40 Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Tetapi untuk kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1										
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022										
Kabupaten Kutai Kartanegara										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.06. 2. 06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				10,305,621,000				9,863,621,000	
2.06 2. 06. 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				10,305,621,000				9,863,621,000	
2.06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100 %	2,883,560,100			100%	2,883,560,100	
2.06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	2,400 lembar perangkat & material	44,900,000	APBD		2.400 lembar Material	44,900,000	
2.06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara	504 Rekening	78,720,000	APBD		504 Rekening	78,720,000	
2.06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tenggarong	20 unit kendaraan	40,000,000	APBD		20 unit kendaraan	40,000,000	
2.06 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	Tenggarong	20 unit	62,500,000	APBD		20	62,500,000	
2.06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Tenggarong	40 jenis	458,313,100	APBD		18 jenis	458,313,100	
2.06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	7 jenis	407,538,100	APBD		7 jenis	407,538,100	
2.06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Tenggarong	10,800 eksemplar	45,000,000	APBD		10.800 eksemplar	45,000,000	
2.06 01 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	10 jenis	20,000,000	APBD		10 jenis	20,000,000	
2.06 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman	Tenggarong	2,000 Kotak	47,500,000	APBD		2.000 Kotak	47,500,000	
2.06 01 01 19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	Tenggarong	97 orang	609,027,200	APBD		88 orang	609,027,200	
2.06 01 01 20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	456 O/B	750,061,700	APBD		456 O/B	750,061,700	
2.06 01 01 21	Penyediaan Jasa Perumahan	Jumlah jasa perumahan	Kota Bangun dan Kembang Janggut	2 UPT	70,000,000	APBD		2 UPT	70,000,000	
2.06 01 01 22	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip	Tenggarong	75,000 berkas	250,000,000	APBD		75.000 berkas	250,000,000	
2.06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur		100 %	1,552,750,000			100%	1,552,750,000	
2.06 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	Tenggarong	1 unit	600,000,000	APBD		1 Unit R4	600,000,000	
2.06 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Tenggarong	52 unit	800,000,000	APBD		52 Unit	800,000,000	
2.06 01 02 10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Tenggarong	13 unit	97,750,000	APBD		60 unit	97,750,000	
2.06 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tenggarong	10 unit kendaraan	55,000,000	APBD		10 unit kendaraan	55,000,000	
2.06 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur		100 %	100,000,000			100%	100,000,000	
2.06 01 05 02	Fasilitasi Tim Bekias	Jumlah Inovasi	Tenggarong	1 Inovasi	100,000,000	APBD		1 Inovasi	100,000,000	
2.06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Capaian Kinerja		100 %	556,940,200			100%	556,940,200	
2.06 01 06 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring	Jumlah dokumen	Tenggarong	8 Dokumen	158,579,000	APBD		8 Dokumen	158,579,000	

2.06	01	01	07	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	Tenggarong	1	dokumen	348,361,200	APBD		1 Dokumen	348,361,200
2.06	01	02	24	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Tenggarong	1	dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
2.06	01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan KTP elektronik			99 %	3,859,642,100			99%	3,859,642,100
					1. Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk			99%	725,868,000			99%	725,868,000
2.06	01	15	20	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	Jumlah layanan KTP	18 Kecamatan	50,000	KTP el (2%)	225,000,000	APBD		50.000 KTPel (2%)	225,000,000
2.06	01	15		Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	18 Kecamatan	74,000	KIA (20%)	400,868,000	APBD		20% (57.000 KIA)	400,868,000
2.06	01	15	23	Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	Jumlah dokumen data	18 Kecamatan	-		-	APBD			-
2.06	01	15		Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai	Jumlah Penertiban	2 Kecamatan	1	Lokasi	100,000,000	APBD		1 Lokasi	100,000,000
					2. Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah			88%	200,000,000			88%	200,000,000
2.06	01	15	24	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	Jumlah akta	18 Kecamatan	500	Kutipan Akta Perkawinan	200,000,000	APBD		500 Kutipan Akta Perkawinan	200,000,000
					3. Persentase Penerbitan Akta Kematian			100%	200,000,000			100%	200,000,000
2.06	01	15		Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kematian	Jumlah akta	18 Kecamatan	500	Kutipan Akta Kematian	200,000,000	APBD		500 Kutipan Akta Kematian	200,000,000
					4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran			99%	919,063,100			99%	919,063,100
2.06	01	15	27	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah akta	18 Kecamatan	3,000	Kutipan Akta Kelahiran	244,063,100	APBD		3.000 Kutipan Akta Kelahiran	244,063,100
2.06	01	15	26	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta	Tenggarong	72	Peserta	175,000,000	APBD		72 Peserta	175,000,000
2.06	01	15	26	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten Kutai	Jumlah akta	Tenggarong	-	-	-	APBD		-	-
2.06	01	15	22	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah	Jumlah akta	Kembang Janggut, Tabang dan	1,500	Kutipan Akta Kelahiran	125,000,000	APBD		1.500 Akta Kelahiran	125,000,000
2.06	01	15	33	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah	Jumlah akta	Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis	1,500	Kutipan Akta Kelahiran	125,000,000	APBD		1.500 Akta Kelahiran	125,000,000
2.06	01	15	35	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah	Jumlah akta	Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana	1,500	Kutipan Akta Kelahiran	125,000,000	APBD		1.500 Akta Kelahiran	125,000,000
2.06	01	15	34	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah	Jumlah akta	Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga	1,500	Kutipan Akta Kelahiran	125,000,000	APBD		1.500 Akta Kelahiran	125,000,000
				Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan	Tenggarong	1	dokumen	1,814,711,000	APBN		1 Laporan	1,814,711,000
2.06	01	16		Program Keserasian Kebijakan Kependudukan				100 %	1,352,728,600			100%	910,728,600
					5. Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi	18 Kecamatan		100 %	442,000,000			-	-
2.06	01	15		Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah RT yang menerima Laptop	Kenohan	55	RT	442,000,000	-			-
					6. Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan			100 %	910,728,600			100%	910,728,600
2.06	01	15	21	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah jaringan yang dipelihara	18 Kecamatan	19	Jaringan	125,000,000	APBD		19 Jaringan	125,000,000

2.06	01	16	08	Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah data base	18 Kecamatan	1 database	125,000,000	APBD		1 database	125,000,000
2.06	01	16	29	Penyajian Informasi Kependudukan	Jumlah dokumen	18 Kecamatan	4 Jenis Informasi	125,000,000	APBD		4 Jenis Informasi	125,000,000
2.06	01	16	35	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah dokumen	Tenggarong	1 Buku Profil Perkembangan Penduduk	75,000,000	APBD		1 Buku Profil Perkembangan Penduduk	75,000,000
2.06	01	16	38	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Jumlah dokumen	Tenggarong	1 Aplikasi	85,000,000	APBD		1 Aplikasi	85,000,000
2.06	01	16	38	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen	Tenggarong	1 Dokumen	126,821,900	APBD		1 Dokumen	126,821,900
2.06	01	16	32	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta	Tenggarong	630 Peserta	248,906,700	APBD		630 Peserta	248,906,700
JUMLAH PAGU								10,305,621,000				9,863,621,000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2021. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Kesesuaian Program/Kegiatan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 tidak dilakukan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak lagi mengakomodir Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penambahan Pagu Kegiatan lebih dikarenakan untuk mendukung peningkatan keikutsertaan BPJS masyarakat yang terdapat pada Desa yang berstatus **Sangat Teringgal** dan **Desa Tertinggal**, hal ini dilakukan untuk menjadi peserta BPJS masyarakat wajib memiliki kelengkapan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain : Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan (bagi non muslim).

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ke

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

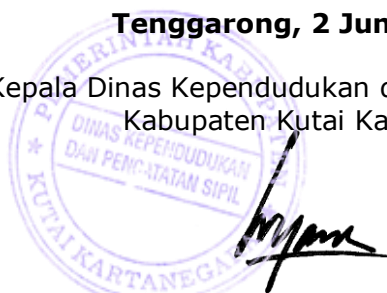
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, 2 Juni 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
NIP.19681210 198803 1 004

LAMPIRAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2021



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020



**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR : 188.4 / 69 / Capil.1 / I / 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 2019, LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) 2019, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) 2021, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2021, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2021, dan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2020, KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SERTA LAPORAN KINERJA SERTA MONITORING DAN EVALUASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari :
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019,
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) 2019
 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 2019
 4. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 2021
 5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021
 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021
 7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2020
- maka dipandang perlu adanya Penetapan Tim dimaksud;
- b. bahwa dengan adanya maksud tersebut untuk huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan tim yang diatur dalam suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD, dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kutai Kartanegara Tahun 2015-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturann Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja;
20. Peraturann Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga;
21. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 188.4/16/SK-PA/Capil.1/I/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2019, Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 2019, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) 2021, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2019, Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 2019, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) 2021, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 07 Januari 2020

Pengguna Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681210 198803 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di - Tenggarong
2. Masing – masing yang bersangkutan di - Tenggarong
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
Nomor : 188.4 / **69** / Capil.1 / I / 2020
Tanggal : 07 Januari 2020
Tentang : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2019, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2019, Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 2019, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) 2021, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020.

SUSUNAN PERSONALIA

Pengarah : Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas)
Penanggung Jawab : H. Hardiansyah, SE., MM (Sekretaris)
Ketua : Muhammad Syamsu Rizal, SE (Kepala Sub Bagian Perencanaan)
Sekretaris : Priasmori IB Zeth, S.IP., M.Si (Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian)
Anggota :
1. Ir. Yasmet (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)
2. Drs. H. Sujoyo Priatno, M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)
3. Aji Dipa Mangku, SE (Plt. Kasi Pemanfaatan Data & Dok. Kependudukan)
4. Ratna Yulianti Adma, S.Sos., M.Si (Kepala Seksi Pendataan Penduduk)
5. Ariyadi, ST (Kasi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi & Komunikasi)
6. Sudy (Kepala Sub Bagian Keuangan)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 07 Januari 2020

Pengguna Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681210 198803 1 004

MATRIK PEMETAAN PROGRAM , KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Renstra Perangkat Daerah			Nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019										Analisis	
Program/Kegiatan			Sub Kegiatan					Kegiatan		Program				
Kode Simral	Nomenklatur	Indikator Program/kegiatan	Kode		Nomenklatur			Indikator (Sub Output)	Nomenkatur	Indikator (Output)	Nomenklatur	Indikator (Outcome)		
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	9	
URUSAN : NON URUSAN (GENERIK)														
0000.020601.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja								Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit 4)Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 6) 7) Rata- rata nilai SKP		
0000.020601.06.017	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
			X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		Jumlah Dokumen			
			X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen			
0000.020601.06.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen			
0000.020601.06.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen									Jumlah Dokumen			
0000.020601.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran								Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
0000.020601.01.015	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
0000.020601.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip												
0000.020601.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
0000.020601.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara			
0000.020601.01.013	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran		Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkantoran			
0000.020601.01.014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara				
0000.020601.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				
0000.020601.01.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jumlah Bahan Bacaan				

0000.020601.01.010	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor			
0000.020601.01.011	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan dan Minuman			
0000.020601.01.007	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
0000.020601.01.012	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi		Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi			
0000.020601.01.051	Penyediaan Jasa Perumahan	Jumlah Jasa Perumahan	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Jasa Perumahan		Jumlah Jasa Perumahan			
0000.020601.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik									Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			
0000.020601.02.008	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan kendaraan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
0000.020601.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			
0000.020601.02.016	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan Mebeleur	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur		Jumlah Pengadaan Mebeleur			
0000.020601.02.003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara			
0000.020601.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nlai Kinerja SKP									Rata-Rata Nlai Kinerja SKP			
0000.020601.05.003	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	2	12	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
URUSAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
020601.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan KTP Elektronik									Cakupan KTP Elektronik		Cakupan KTP Elektronik	
020601.15.001	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	Jumlah layanan KTP-el	2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan KTP-el, KIA, KK, dan SKPWNI	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan KTP-el, KIA, KK, dan SKPWNI	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan KTP Elektronik	
020601.15.002	Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan KTP-el, KIA, KK, dan SKPWNI	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan KTP-el, KIA, KK, dan SKPWNI	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan KTP Elektronik	
			2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan KTP-el, KIA, KK, dan SKPWNI	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan KTP-el, KIA, KK, dan SKPWNI	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan KTP Elektronik	

020601.15.004	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penertiban	2	12	2	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah penertiban	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penertiban	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan KTP Elektronik	
			2	12	2	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penertiban	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penertiban	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan KTP Elektronik	
020601.15.005	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	Jumlah akta	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah	
020601.15.006	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kematian	Jumlah akta	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Akta Kematian	
020601.15.007	Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah akta	2	12	03	2.01	01	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah akta pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	
020601.15.008	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta	2	12	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan ini dipindahkan ke Generik.
020601.15.008	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah akta	2	12	3	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	
020601.15.010	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang Janggut	Jumlah akta	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	
020601.15.011	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota Bangun	Jumlah akta	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	
020601.15.012	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Jawa	Jumlah akta	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	
020601.15.013	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara Badak	Jumlah akta	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	
020601.16	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan									Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan		Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
020601.16.002	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah jaringan yang dipelihara	2	12	4	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	

020601.16.003	Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah data base	2	12	4	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
020601.16.004	Penyajian Informasi Kependudukan	Jumlah Informasi	2	12	4	2.01	04	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Informasi	Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2	12	4	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
020601.16.005	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah dokumen	2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
			2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
020601.16.006	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Jumlah dokumen	2	12	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen	Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
020601.16.007	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen	2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
020601.16.008	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta	2	12	04	2.03	08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	

Tenggarong, 18 Juni 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19681210 198803 1 004